

## Analisa Ancaman Kenaikan Harga Pangan di Indonesia Akibat Perang Rusia-Ukraina Saat Pandemi Covid-19

Ridha Ayu Rachmawati<sup>1</sup>, Herlina Juni Risma Saragih<sup>2</sup>, I Gede Sumertha Kusuma Yanca<sup>3</sup>,  
Pujo Widodo<sup>4</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [ridhayur@gmail.com](mailto:ridhayur@gmail.com)<sup>1</sup>, [herlinsara897@gmail.com](mailto:herlinsara897@gmail.com)<sup>2</sup>, [gedesu16@yahoo.co.id](mailto:gedesu16@yahoo.co.id)<sup>3</sup>,  
[pujowidodo78@gmail.com](mailto:pujowidodo78@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menggambarkan adanya ancaman non-militer yaitu kenaikan harga pangan di Indonesia akibat perang Rusia dan Ukraina pada saat Pandemi Covid-19 serta strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ini karena berpotensi besarnya dampak pada pertahanan nirmiliter khususnya bidang ekonomi Indonesia. Untuk mencapai tujuan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka (*library research*). Selanjutnya untuk menganalisa data, digunakan teknik analisis data kualitatif dan metode penulisan deduktif

**Kata Kunci:** Ancaman Non-militer, Kenaikan Harga Pangan, Indonesia, Konflik, Perang Rusia-Ukraina, Pandemi Covid-19



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pemerintahan Vladimir Putin yakni Presiden Rusia resmi mengumumkan perang terhadap Ukraina terhitung sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu. Untuk mengetahui sebab-akibat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, maka perlu mengetahui latar belakang kedua negara tersebut. Sejak dahulu, wilayah Ukraina sudah menjadi rebutan bangsa-bangsa besar di Eropa timur. Berabad-abad lamanya kawasan yang kemudian disebut sebagai Ukraina dikuasai atau dibagi wilayahnya oleh bangsa-bangsa lain dari zaman dahulu hingga memasuki era modern. Pada tanggal 23 Juni tahun 1917, Republik Rakyat Ukraina berdiri sebagai negara Ukraina modern. Menurut Nicholas V. Riasanovsky (dalam buku *A History of Russia*, 1963), Republik ini diakui internasional. Sebelum itu, Ukraina merupakan bagian dari Pemerintahan Sementara Rusia usai Revolusi Rusia.

Revolusi ini menggantikan sistem Tsar di Rusia menuju pembentukan Uni Soviet. Republik Rakyat Ukraina tak bertahan lama dan jatuh seiring dideklarasikannya Negara Ukraina yang anti-sosialis pada 29 April 1918. Namun, pemerintah baru ini juga berlangsung singkat saja dan berakhir pada Desember 1918, dan digantikan kembali oleh Republik Rakyat Ukraina dengan pusatnya di Kiev. Perjanjian Riga pada 18 Maret 1921 semakin memperumit urusan kekuasaan di Ukraina karena banyak kepentingan yang ikut bermain. Terjadilah Perang Ukraina-Soviet yang berakhir dengan memasukkan wilayah Ukraina ke dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet yang merupakan representasi dari Rusia.

Dengan segala dinamika dalam perjalanan sejarah dan kerumitannya dengan Rusia, wilayah Ukraina ikut terseret ke pusaran Perang Dunia II (1939-1945), yang dilanjutkan Perang Dingin. Perang ini melibatkan dua kubu besar, yakni Blok Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat melawan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet alias Rusia. Dikutip dari *Ukraine: A History* (2000) yang disusun Orest Subtelny, pada 21 Januari 1990, lebih dari 300.000 warga Ukraina membentuk rantai manusia untuk kemerdekaan Ukraina antara Kiev dan Lviv. Berikutnya, tanggal 24 Agustus 1991, Dewan Agung Ukraina menyatakan bahwa

hukum dari Uni Soviet tidak berlaku lagi di Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet meskipun belum secara *de jure*.

Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1991, digelar referendum oleh rakyat Ukraina untuk menentukan pilihan: tetap bersama Uni Soviet atau merdeka sebagai negara sendiri. Hasil referendum menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen warga Ukraina memilih merdeka dengan suara bulat di setiap daerah. Pada hari yang sama setelah referendum, seperti dilansir BBC News lewat laporannya bertajuk "*Ukraine Country Profile*", warga Ukraina memilih presiden mereka untuk pertama kalinya adalah Leonid Kravchuk yang terpilih sebagai presiden pertama Ukraina. Ukraina benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh setelah Uni Soviet resmi membubarkan diri pada 26 Desember 1991. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara *de jure* dan diakui oleh komunitas internasional.

Penyebab Perang Rusia dan Ukraina terkini sejak menjadi negara merdeka, Ukraina masih kerap terlibat polemik atau ketegangan dengan Rusia, terutama pada era pemerintahan Presiden Ukraina ke-2, yakni Viktor Yushchenko yang menjabat sejak 2005 hingga 2010. Penyebabnya terutama karena Yushchenko lebih merapat ke Uni Eropa ketimbang dengan Rusia. Ketegangan meningkat lantaran Krisis Krimea tahun 2014. Kawasan Semenanjung Krimea yang semula berada di wilayah Ukraina dianeksasi oleh Rusia. Dilaporkan BBC News (13 November 2014), Krisis Krimea memicu kerusuhan serta perpecahan di Ukraina bagian timur dan selatan.

Pada tanggal 11 Mei 2014, gerakan separatis di Ukraina mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Dua wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadinya kembali konflik Ukraina vs Rusia sejak tahun 2021 dan memicu perang pada Februari 2022. Donetsk dan Luhansk, yang termasuk dalam area bernama Donbas, dihuni oleh mayoritas warga yang dekat dengan kultur Rusia. Ratusan ribu rakyat Donbas bahkan sudah berstatus sebagai warga negara Rusia.

Pemerintahan Vladimir Putin yakni Presiden Rusia resmi mengumumkan perang terhadap Ukraina terhitung sejak Kamis 24 Februari 2022. Putin menganggap Ukraina sebagai ancaman dan berdalih melindungi warga sipil. Ia juga menuding Amerika Serikat dan sekutunya yang memicu keputusan tersebut karena mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, Putin juga memperingatkan kepada negara-negara lain untuk tidak mengganggu misi Rusia di Ukraina. Jika tidak, ada ancaman mengerikan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia tersebut. "Kepada siapa pun yang akan mempertimbangkan untuk ikut campur dari luar, jika Anda melakukannya, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Semua keputusan yang relevan telah diambil. Saya harap Anda mendengar saya," tandas Putin. Pihak Ukraina tidak tinggal diam dan membalas pernyataan perang oleh Rusia.

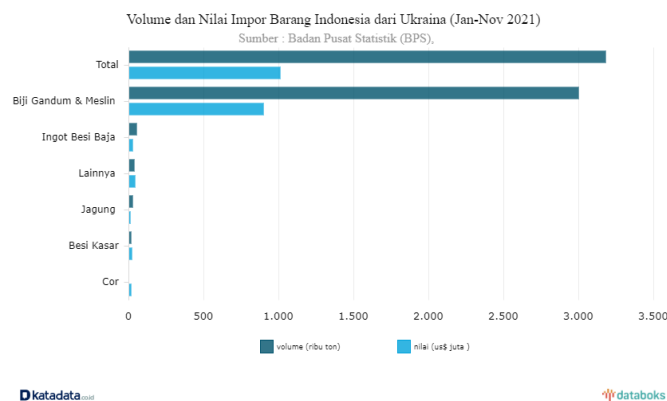
Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oleg Nikolenko, Ukraina menegaskan akan memberikan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air mereka karena ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Statuta PBB, norma, dan prinsip hukum Internasional. Kemudian ia juga mengatakan "Kami harus melawan penyerang dan mempertahankan tanah Ukraina sekuat mungkin". Hingga saat ini, serangan Rusia ke beberapa kota di Ukraina masih berlangsung dan sudah memakan korban. Banyak pihak dari seluruh dunia yang menyerukan kepada Rusia agar menghentikan agresinya dan menghormati kedaulatan Ukraina.

Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan setidaknya sebanyak 1.000 anggota militer tewas dalam serangan Rusia pada Jumat 25 Februari 2022 seperti dilansir dalam berita CNN Indonesia berjudul "Ukraina Sebut 1.000 Anggota Militer Tewas Akibat Serangan Rusia" yang dimuat pada Sabtu, 26 Februari 2022. Meski Rusia mengklaim hanya menargetkan basis-

basis militer Ukraina namun faktanya yang menjadi korban perang dalam beberapa hari ini terakhir bukan hanya dari militer namun juga sipil. Penduduk sipil memang tak akan lepas dari kerugian dan akan selalu menjadi korban selama perang berlangsung.

Tak hanya itu, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir hingga saat ini. Dilansir dari The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (JHU CSSE Covid-19 Data) di Ukraina COVID-19 masih mengalami kenaikan jumlah kasus baru terhitung dari bulan Desember 2021 hingga Februari 2022. Kenaikan jumlah kasus baru tersebut naik drastis dari 1889 kasus baru pada 4 Januari 2022 melonjak menjadi 43.477 kasus baru pada 10 Februari 2022. Di Indonesia sendiri wabah COVID-19 naik drastis akibat varian Omicron yang diketahui memang persebarannya jauh lebih cepat dibanding varian-varian COVID-19 sebelumnya. Masih dari sumber yang sama Indonesia tercatat memiliki 274 kasus baru di 1 Januari 2022 namun melonjak hingga lebih dari 63.000 kasus baru di bulan Februari 2022.

Dari dua fakta tersebut di atas, semuanya memiliki hubungan yang erat ke sektor ekonomi pada sebuah negara. Indonesia dan Ukraina sendiri memiliki hubungan ekonomi yang cukup baik. Berikut adalah beberapa barang yang diimpor oleh pemerintah Indonesia dari Ukraina yang dihimpun dari data Badan Pusat Statistik (BPS) oleh Katadata.co.id periode Januari hingga November 2021, yakni nilai total impor Indonesia mencapai US\$1,01 miliar. Volume impor gandum dan meslin pada periode tersebut berjumlah 3,18 juta ton atau 94,37% dari total volume impor. Adapun nilai impor gandum dan meslin ini mencapai US\$897,7 juta atau 88,61% dari total nilai impor. Selanjutnya, barang yang diimpor Indonesia dari negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky (Presiden Ukraina) ini adalah ingot besi baja seberat 52,38 ribu ton dengan nilai US\$25,19 juta. Diikuti komoditas lainnya seberat 38,09 ribu ton dengan nilai US\$42,86 juta, serta jagung seberat 27,83 ribu ton senilai US\$9,81 juta. Ada pula impor besi kasar, besi cor, dan besi beton seberat 18,33 ribu ton dengan nilai US\$20,85 juta, serta gandum-gandum lainnya seberat 0,04 juta ton dengan nilai US\$16,64 juta.

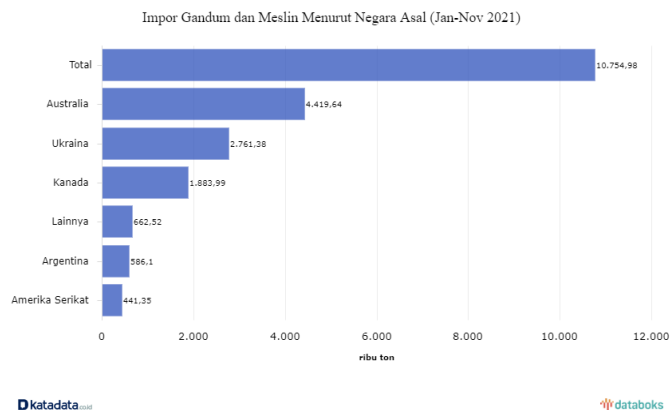


**Gambar 1.** Volume dan Nilai Impor Barang Indonesia dari Ukraina (Jan-Nov 2021)  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Ukraina merupakan negara terbesar kedua pemasok gandum dan meslin (tepung gandum) bagi Indonesia. Di Indonesia, gandum merupakan bahan baku untuk terigu dan produk mie instan. Serangan Rusia beberapa hari terakhir dikhawatirkan akan menyebabkan kenaikan harga komoditas, termasuk gandum. Dalam sebulan terakhir, harga gandum dunia telah meningkat sekitar 24%.

Berdasarkan data BPS, volume impor gandum dan meslin mencapai 10,74 juta ton sepanjang Januari-November 2021. Adapun nilainya mencapai US\$ 3,3 miliar. Impor gandum

dan meslin terbesar Indonesia berasal dari Australia dengan volume mencapai 4,42 juta ton (41,09%) dengan nilai US\$ 1,37 miliar pada periode Januari-November 2021. Impor gandum dan meslin terbesar Indonesia berikutnya berasal dari Ukraina dengan volume 2,76 juta ton (25,68%) dengan nilai US\$ 821 juta. Diikuti Kanada dengan volume 1,88 juta ton (17,52%) dengan nilai US\$ 623,35 juta. Setelahnya ada Argentina dengan volume impor gandum dan meslin 586 ribu ton (5,45%) dengan nilai US\$ 162 juta, serta dari Amerika Serikat sebesar 441,35 ribu ton (4,1%) senilai US\$ 131,31 juta. Sedangkan impor gandum dan meslin dari negara lainnya mencapai 662,52 ribu ton (6,16%) dengan nilai US\$ 182,98 juta.



**Gambar 2.** Impor Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal (Jan-Nov 2021)  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Melihat besarnya dampak ekonomi yang mungkin terjadi, menurut saya menjadi penting jika perang Rusia dan Ukraina untuk dibahas dan dianalisa potensi dampaknya pada pertahanan nirmiliter khususnya di bidang ekonomi Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisa Ancaman Kenaikan Harga Pangan di Indonesia Akibat Perang Rusia-Ukraina Saat Pandemi Covid-19”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode berbasis filosofi untuk mengkaji keadaan objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrument utama (Sugiyono, 2013). Tujuannya agar memberikan eksplanasi analisis dengan menjelaskan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang hal – hal yang berkaitan dengan ancaman kenaikan harga pangan di Indonesia akibat perang Rusia-Ukraina pada saat Pandemi Covid-19.

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Dimana data sekunder dapat diperoleh dari sumber tidak langsung berupa buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar, artikel, internet atau referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah Studi Pustaka (*library research*), yakni mengumpulkan sejumlah literatur dari berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun literatur tersebut berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar dan situs-situs internet yang sifatnya valid atau pasti.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

Penulis akan menjelaskan secara umum mengenai konflik Rusia-Ukraina pada saat Pandemi Covid-19, kemudian menjelaskan secara khusus dan menarik kesimpulan ancaman kenaikan harga pangan di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dampak Perang Rusia-Ukraina Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Pangan di Indonesia

Menurut data hasil survey dari kerjasama antara SMERU Research Institute, PROSPERA, UNDP, dan UNICEF, hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) selama akhir tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan dari yang mereka terima pada bulan Januari 2020. Rumah tangga pada seluruh kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga yang paling berkecukupan melaporkan persentase penurunan pendapatan yang sama. Terdapat banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi dan berada di tengah-tengah kelompok distribusi pendapatan kemudian jatuh miskin atau menjadi rentan terhadap kemiskinan. Bagi sebagian besar rumah tangga, penurunan pendapatan bukanlah satu-satunya tantangan namun pula terjadi peningkatan pengeluaran.

Penyumbang utama dari peningkatan pengeluaran adalah naiknya biaya belanja bahan makanan dan keperluan pokok lainnya. Proporsi rumah tangga dengan anak yang menghabiskan lebih banyak biaya internet dan telepon genggam secara signifikan lebih besar (65%) dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki anak (28,9%).

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga. Satu pertiga dari responden memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan hampir seluruh usaha ini (87,5%) telah terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Kekhawatiran yang utama dari para pelaku usaha mikro dan kecil ini ialah pelanggan yang menjadi lebih sedikit, menurunnya penerimaan, serta meningkatnya biaya operasional.

Hampir sepertiga (30%) responden merasa khawatir mereka tidak bisa memberi makan keluarga. Proporsi dari rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan sedang dan parah telah meningkat menjadi 11,7% di tahun 2020. Penurunan pendapatan dan gangguan sistem pasokan makanan adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan. Rumah tangga yang memiliki anggota dengan disabilitas mengalami kehilangan pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Satu dari 10 (sepuluh) rumah tangga dengan anggota keluarga disabilitas ringan mengalami kehilangan pekerjaan karena Pandemi Covid-19 dan delapan dari 10 (sepuluh) rumah tangga tersebut mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19. Sedangkan, rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berat tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan atau layanan terapi yang mereka butuhkan. Terdapat lebih banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tidak memiliki tabungan (56,7%) dimana tabungan dapat digunakan sebagai penyangga kehidupan di saat krisis, dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (50,6%).

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir sektor pangan dihantam Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim yang mengganggu produksi dan distribusinya. Kondisi ini diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pupuk yang merupakan bagian dari proses produksi pangan. Selain itu, adanya potensi kebijakan *The Fed* menaikkan tingkat suku bunga yang biasanya berdampak pada negara - negara berkembang.

Hubungan perdagangan Indonesia dan Ukraina paling besar adalah gandum. Gandum yang berasal dari Ukraina memadati sekitar 40 persen pasar gandum di Indonesia setelah Australia. Meletusnya konflik antara Ukraina dan Rusia memunculkan kekhawatiran tersendiri



bagi Indonesia. Terutama terkait dengan pasokan gandum ke Indonesia. Indonesia merupakan importir utama dan terbesar gandum di dunia. Posisinya bahkan mengungguli dua negara lain yakni Turki dan Mesir. Berdasarkan data dari trademap.org, Indonesia secara konsisten mengimpor gandum dan meslin (kode HS 1001), dengan volume di atas 10 juta ton dalam kurun 2016 hingga 2020. Bahkan pada 2017, volume impor gandum Indonesia menembus 11,43 juta ton. Berdasarkan data terbaru pada 2020 lalu, Indonesia mengimpor gandum dengan volume sebanyak 10,29 juta ton. Sementara itu, Turki mengimpor sebanyak 9,65 juta ton dan Mesir sebanyak 9,59 juta ton.

Tingginya kebutuhan impor gandum Indonesia tersebut tidak mengherankan. Sebab, gandum yang lalu diolah menjadi tepung terigu, telah menjadi bahan baku utama dari sejumlah bahan pangan favorit masyarakat Indonesia. Produk tersebut antara lain mie, roti, kue dan sejumlah produk pangan lain. Selain itu, gandum juga dibutuhkan untuk campuran bahan baku pakan ternak. Seperti dilansir Bisnis.com menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang pada medio 2019 lalu, dia menyebutkan bahwa 90% gandum yang diimpor Indonesia digunakan untuk industri tepung terigu. Sementara itu, 10% sisanya diantaranya digunakan untuk kebutuhan lain seperti campuran bahan baku pakan ternak. Lalu apa kaitan konflik Ukraina dan Rusia dengan aktivitas impor gandum Indonesia? Dengan posisinya sebagai importir terbesar gandum, maka Indonesia akan sangat rawan terganggu dalam mendapatkan pasokan komoditas itu. Apalagi Ukraina dan Rusia adalah dua negara pemasok utama gandum ke seluruh dunia.

Pada tahun 2020 lalu, Rusia mengeksport 37,26 juta ton gandum. Sedangkan Ukraina mengeksport sebanyak 18,1 juta ton pada periode yang sama. Apabila ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut, beberapa pengamat memperkirakan pasokan produk dari kedua negara itu berpeluang terhambat atau bahkan terhenti. Direktur *Center of Economic and Law Studies* Bhima Yudhistira pada Jumat 25 Februari 2022 mengatakan, bahwa sejumlah barang berpeluang terhambat pengirimannya ketika konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung dan membesar, tak terkecuali gandum. Hal ini terbukti, karena efek konflik Ukraina dan Rusia membuat harga gandum di pasar global mencapai level tertingginya dalam 9 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Bursa Chicago, harga gandum pada Kamis 24 Februari 2022 menembus US\$932,75 per bushel. Salah satu sentimen utama yang mengiringi harga gandum naik adalah kekhawatiran terhadap penguncian akses terhadap Rusia dan Ukraina, sehingga membuat pengiriman produk seperti gandum terganggu.

Tingginya ketergantungan impor terhadap gandum, berpeluang membuat Indonesia sangat rawan tersengat oleh efek perang Ukraina dan Rusia. Sebab, Ukraina merupakan negara pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Data dari BPS melaporkan, pada 2020 volume impor gandum Indonesia dari Ukraina mencapai 2,96 juta ton. Ukraina mengungguli Argentina dan Kanada sebagai pemasok gandum terbesar kedua dan ketiga bagi Indonesia.

Volume impor Indonesia dari kedua negara itu masing-masing sebanyak 2,6 juta ton dan 2,3 juta ton. Volume impor gandum Indonesia dari Ukraina tercatat meningkat pesat sejak 2010. Adapun pada saat itu, BPS mencatat, impor gandum dari negara tersebut hanya mencapai 18.074 ton saja. Lonjakan tertinggi terjadi dari 2015 ke 2016. Kala itu impor gandum dari Ukraina naik dari 664.000 ton menjadi 2,4 juta ton.

Dengan demikian, tergambar sudah bagaimana tingginya ketergantungan impor gandum Indonesia terhadap Ukraina. Apalagi jika Ukraina benar-benar harus terisolasi dalam hal pengiriman barang, maka Indonesia harus bersaing dengan negara lain seperti Mesir dan Bangladesh untuk mencari negara pemasok lain. Seperti yang diketahui, Mesir dan Bangladesh merupakan importir terbesar kedua dan ketiga produk gandum dari Ukraina.

Indonesia sejatinya bisa saja mengalihkan permintaan gandum ke negara tetangga, yakni Australia. Adapun, berdasarkan data BPS, sejak 2010 Australia merupakan pemasok terbesar gandum ke Indonesia, sebelum merosot drastis mulai 2017. Sejak 2010-2017 Australia konsisten memasok lebih dari 3 juta ton gandum ke Indonesia. Namun mulai pada 2018 volume eksportnya turun menjadi sekitar 2,8 juta ton sebelum akhirnya merosot di kisaran 800.000 ton pada 2019-2020. Di sisi lain, potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga gandum tersebut berpeluang menekan sejumlah perusahaan Indonesia, utamanya yang mengimpor dan mengolah komoditas pangan itu. Berdasarkan penelitian CDMI Consulting, pada 2017 terdapat lima perusahaan yang paling banyak melakukan impor gandum. Peringkat pertama terdapat nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang mengimpor sebanyak 4,78 juta ton gandum. Posisi INDF itu disusul oleh PT Bungasari Flour Mills Indonesia, PT Agristar Grain Indonesia, PT Eastern Pearl Flour Mills, PT Sriboga Flour Mills dan 20 perusahaan importir gandum lainnya. Namun sayangnya, ketika ditelusuri melalui laporan keuangannya, INDF tidak mencantumkan laporan mengenai detail aktivitas impor gandum yang mereka lakukan selama ini. Termasuk volume dan ongkos yang dikeluarkan untuk mengimpor gandum.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara. Invasi Ukraina oleh Rusia pada 24 Februari 2022 menandai kembalinya perang antar negara yang menjadi sesuatu yang belum pernah dialami Eropa sejak tahun 1945 sehingga perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius bagi pasar global yang berpotensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ekonomi di seluruh dunia.

Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global. Rusia adalah produsen dan pengeksport minyak terbesar ketiga di dunia, pengeksport gas bumi terbesar kedua, dan pengeksport batubara terbesar ketiga. Rusia juga merupakan pengeksport gandum terbesar di dunia dan pengeksport minyak bunga matahari terbesar kedua. Selain itu, Rusia juga mendominasi perdagangan pupuk global dan menjadi pengeksport pupuk terbesar. Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global seperti pengeksport minyak bunga matahari terbesar, pengeksport jagung terbesar keempat dan pengeksport gandum terbesar kelima.

Sebagai pemasok utama logam dan mineral tentu dengan adanya perang Rusia dan Ukraina akan mengganggu pasokan mineral dan logam yang pasti akan mempengaruhi produksi di sejumlah sektor industri. Hal ini menyebabkan terdapat perubahan dalam harga atau ketersediaan makanan dan energi yang akan berdampak langsung pada masyarakat dan negara di seluruh dunia. Rusia dan Ukraina memiliki peranan yang penting bagi pasar energi, makanan, dan pupuk global sehingga sangat penting untuk mengantisipasi konflik yang muncul.

Berdasarkan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada awal 2022, Rusia dan Ukraina secara kolektif menyumbang lebih dari setengah perdagangan global minyak dan biji-bijian, sekitar seperempat dari semua yang diperdagangkan gandum dan barley, dan sekitar seperenam dari jagung yang diperdagangkan. Kedua negara tersebut merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara yang mengalami defisit pangan di Afrika Utara dan Timur Tengah, Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan dan Tenggara. Rusia dan Ukraina menyumbang 100 persen dari impor gandum ke Somalia, lebih dari 80 persen ke Mesir, 75 persen ke Sudan, dan lebih dari 90 persen ke Laos, dan sekitar 95 persen impor minyak

bunga matahari ke Cina dan India serta lebih dari 37 persen impor minyak dan gas bumi ke Asia Tenggara.

Selain itu, sebagian besar negara Amerika Selatan dan Tengah, Afrika Barat dan Eropa termasuk Ukraina sendiri sangat bergantung pada Rusia untuk impor pupuk mereka, terutama untuk kalium. Dengan demikian, Rusia mendominasi dalam berbagai komoditas terutama dalam ekspor gas alam untuk bahan bakar produksi pupuk nitrogen di seluruh Eropa dan Asia Tenggara.

Invasi Rusia ke Ukraina tentu mengganggu ekonomi global yang berkepanjangan ditambah akibat dari Pandemi Covid-19. Meskipun beberapa ekonomi negara telah bangkit kembali dengan cepat akibat Pandemi Covid-19. Tetapi dalam perang Rusia dan Ukraina menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan yang besar. Hal ini berkaitan dengan kontribusi peningkatan harga energi dan pangan sehingga menimbulkan krisis karena pemerintah dari berbagai negara mengurangi dukungan atau ikut campur terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Dari krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentu berimbas kepada bidang ekonomi dan tentu konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional. Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi terjadi. Akan tetapi, tentu negara yang memiliki hubungan dengan Rusia atau Ukraina akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual dalam wawancaranya bersama Kontan.co.id, mengatakan bahwa memproyeksikan inflasi di Februari 2022 akan berada pada kisaran 0,24% month to month (mtm) atau 2,32% year on year (yoy). Hal ini dikarenakan ada beberapa harga komoditas pangan yang mulai mengalami peningkatan, seperti harga daging ayam, cabai rawit hijau, daging sapi, cabai rawit merah dan lainnya. Seperti contoh harga minyak goreng walau harga patokannya rendah tapi di beberapa pasar nyatanya relatif langka, jikapun ada harganya jadi lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan.

Kenaikan harga minyak juga berpengaruh terhadap harga pangan. Hal ini akan menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG yang ditanggung dan berpotensi melebihi asumsi APBN 2022. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, setiap kenaikan harga minyak mentah USD 1 per barel akan berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

Selain itu, kenaikan ICP juga memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi listrik, dimana setiap kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 295 miliar (Bisnis Indonesia, 1 Maret 2022). Saat ini (Agustus 2022) harga minyak mentah terus melonjak dan melewati USD 140 per barel.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah konflik yang terjadi antara Rusia - Ukraina dan Pandemi Covid-19 yang juga belum usai sehingga berdampak kepada kestabilan harga pangan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia dapat berperan lebih aktif dengan membangun komunikasi dengan Rusia dan Ukraina. Meski jauh secara geografis namun secara keseluruhan aspek-aspek dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) harus dipersiapkan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang mungkin dihadapi Indonesia.

Selain persiapan militer, pemerintah melalui menteri-menterinya dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan umum untuk mempertahankan negara sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Jakum Hanneg). Untuk menanggulangi pasokan gandum dan komoditas lain yang terdampak pemerintah juga dapat segera untuk mencari sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.



## Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Kenaikan Harga Pangan di Indonesia Akibat Perang Rusia – Ukraina Pada Saat Pandemi Covid-19

Berbagai upaya telah dilakukan demi menghentikan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Negara-negara Eropa Barat dan AS menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Namun sanksi tersebut tidak akan efektif karena adanya 3 (tiga) alasan. Pertama, sanksi ekonomi baru akan terasa di level masyarakat Rusia dan para elite dalam waktu 6 bulan bahkan satu tahun ke depan. Kedua, Rusia harus dibedakan dengan Iran ataupun Korea Utara yang masih sangat bergantung pada banyak negara. Ketiga, Rusia akan dibantu oleh sekutu-sekutunya, bahkan oleh Tiongkok yang melihat potensi keuntungan secara finansial.

Penyelesaian melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (Resolusi DK PBB) juga tidak bisa membuahkan hasil mengingat di dalam DK PBB ada Rusia yang merupakan Anggota Tetap yang memiliki Hak Veto. Draft resolusi yang bertujuan untuk melumpuhkan Rusia secara militer pasti akan di-veto oleh Rusia. Satu-satunya upaya terbuka untuk penyelesaian damai adalah melalui Resolusi Majelis Umum PBB (Resolusi MU PBB). Dalam Resolusi MU PBB, semua negara anggota MU PBB tidak mempunyai Hak Veto dan semua negara anggota MU PBB memiliki satu suara yang sama. Disamping itu, di dalam MU PBB semua negara anggota bisa berperan.

Resolusi MU PBB yang menyangkan agresi Rusia ke Ukraina disetujui oleh 141 dari 181 negara yang hadir melalui *voting* (pemungutan suara). Sementara 35 negara memilih abstain dan lima negara menolak. Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor Leste termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang setuju tentang resolusi menyangkan agresi Rusia terhadap Ukraina. Negara-negara yang tidak setuju dengan Resolusi MU PBB itu adalah Federasi Rusia, Belarusia, Korea Utara, Suriah, dan Eritrea. Kemudian negara-negara yang memilih abstain adalah India, Iran, China, Afrika Selatan, Laos, dan Vietnam.

Maka dari itu, opsi terbaik terhadap konflik Rusia-Ukraina adalah mediasi. Saat ini Ukraina dan Rusia sudah berupaya untuk melakukan mediasi, kedua belah pihak saling bernegosiasi dan menyampaikan tuntutan satu sama lain, proses ini dapat dipahami sebagai *Peacemaking* dalam upaya resolusi konflik Rusia dan Ukraina. Selalu ada perkembangan yang menuju kearah kesepakatan bersama setiap perundingannya, namun mungkin dibutuhkan lebih banyak perundingan agar kedua belah pihak benar benar yakin dan sepakat dengan keputusan yang diambil. Di perundingan putaran pertama Rusia menyampaikan tuntutan-tuntutannya sebagai syarat untuk menghentikan serangan, Ukraina mendengarkan tuntutan itu dan tidak langsung menyepakatinya, namun pada pertemuan putaran kedua dan ketiga Ukraina mulai melunak demi keselamatan masyarakat Ukraina sehingga kedua belah pihak memutuskan melakukan gencatan senjata sementara untuk menyalurkan kebutuhan obat-obatan dan bantuan pangan kepada pengungsi.

Dapat dilihat bahwa di setiap pertemuan kedua belah pihak saling melunak dan mengerti satu sama lain sehingga proses perdamaian akan lebih cepat dan lancar. Rusia dan Ukraina sedang menuju tahap selanjutnya dalam proses perdamaian yaitu *peacekeeping*, setelah bernegosiasi kedua belah pihak akan mengimplementasikan keputusan yang sudah diambil dengan mengikuti aturan-aturan dalam kesepakatan. Sebenarnya kedua belah pihak sudah pernah melewati tahap ini setelah disepakatinya Perjanjian Minsk I dan II yang ditandatangani pada tahun 2014 dan 2015 di Minsk, Belarus. Perjanjian ini adalah bagian dari upaya *peacemaking* konflik antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina. Perjanjian ini juga menyusun tata cara pemilu di wilayah pendudukan di Luhansk dan Donetsk, serta rencana mengintegrasikan dua wilayah itu ke Ukraina (Iswara, 2022).

Setelah disepakatinya perjanjian Minsk, dalam implementasinya perjanjian ini mampu menciptakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, namun tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama karena Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada tahun 2022 dan menyatakan bahwa perjanjian Minsk sudah tidak berlaku, Rusia juga mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk yang berarti mendisintegrasikan kedua wilayah tersebut dari Ukraina dan melanggar perjanjian Minsk. Hal tersebut dilakukan Rusia karena menilai Ukraina mulai mengancam keamanan dan kedaulatan Rusia yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Maka dari itu perjanjian yang akan disepakati sekarang harus lebih mendalam sehingga dimasa depan tidak mengalami kegagalan.

Rusia dan Ukraina sudah lama berkonflik, upaya *Peacemaking* dan *Peacekeeping* sudah berkali-kali dilakukan namun tidak benar-benar mencapai tahap yang benar benar damai atau *Positive Peace* karena konflik tersebut semakin lama semakin mengalami eskalasi karena sebab-sebab dari munculnya konflik tidak benar benar diselesaikan. Jika dibiarkan konflik tersebut akan semakin besar dan dapat membahayakan negara lain disekitar Rusia dan Ukraina sehingga saat ini sangat diperlukan upaya *Peacebuilding* yang mencapai tahap *Positive Peace* agar kedua negara dapat berdamai dalam jangka panjang dan konflik tersebut tidak mengalami eskalasi lagi. Untuk mencapai tahap tersebut tentu saja dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari aktor lain sebagai mediator, seperti Turki, Belarus, dll.

Dalam proses perdamaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai mampu menjadi mediator dan membantu menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia karena Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik, termasuk konflik Kamboja melalui Pertemuan Informal Jakarta pada tahun 1988 dan 1989. Indonesia juga merupakan negara yang netral baik terhadap Rusia atau Ukraina.

Pemerintah Indonesia sejauh ini melalui juru bicara Menteri Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyampaikan 4 (empat) sikap terkait konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina. Pertama, Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian. Kedua, Indonesia menegaskan ditaatinya hukum internasional dan Piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Ketiga, agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Keempat, Kedutaan Besar RI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan.

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Rusia dan Ukraina usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 di Jerman pada 26 Juni 2022. Kunjungan tersebut dimulai dari Ukraina yang bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan kemudian lanjut mengunjungi Presiden Putin di Istana Kremlin, Moskwa pada 30 Juni 2022. Hal ini dilakukan untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian karena perang memang harus dihentikan dan berkaitan dengan rantai pasok pangan yang harus diaktifkan kembali. Selain itu, mempertegas posisi Indonesia dalam merespons perang Rusia - Ukraina, Jokowi mengatakan tidak berpihak kemanapun tapi berpihak pada keputusan *non-aligned movement* atau dapat dikatakan Indonesia merupakan negara Non-Blok. Bagi Indonesia, hal tersebut dilakukan karena merupakan wujud dari prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

Politik Luar Negeri Bebas-Aktif bukan berarti netral aktif, melainkan juga memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu juga, sikap Indonesia bukan sekadar mengikuti

negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum Internasional.

Saat ini Indonesia merupakan tuan rumah dari Presidensi G-20. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus menghindari potensi forum G-20 untuk dimanfaatkan sebagai ajang persengketaan terkait masalah Rusia dan Ukraina. Tema Presidensi G20 adalah *“Recover Together, Recover Stronger”* dimana hal ini membawa 3 (tiga) isu utama yakni kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi ekonomi dan digital. Ketiga isu ini diangkat berdasarkan situasi pemulihan ekonomi global akibat Pandemi Covid-19.

Momen tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk mendapatkan hasil agar adanya perdamaian di antara Rusia-Ukraina, mengingat hubungan Indonesia-Rusia serta Indonesia-Ukraina sangat baik dan bersahabat. Hal ini selaras dengan dampak yang ditimbulkan akibat perang Rusia dan Ukraina seperti *Cyber War*, krisis ekonomi (perdagangan, ekspor-impor, inflasi mata uang, dll), krisis energi, dan lain sebagainya. Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri pertemuan puncak G-20 pada November mendatang di Bali. Partisipasi negara Barat sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi dunia dan partisipasi seluruh negara G-20 amat diperlukan agar agenda-agenda G-20 Indonesia dapat terwujud dengan baik. Tidak ada jalan lain. Agar Presidensi G-20 Indonesia berhasil, Indonesia harus dapat membujuk seluruh anggota G-20 untuk datang ke pertemuan puncak G-20. Sehingga patut menjadi pertimbangan agar Indonesia menjadi mediator dalam resolusi konflik ini apalagi Indonesia sekarang menjadi tuan rumah Presidensi G-20.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Meski secara geografis Indonesia jauh dari Rusia dan Ukraina namun Perang Rusia - Ukraina dapat berdampak negatif kepada sektor ekonomi dalam negeri khususnya pangan karena Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar kedua ke Indonesia yang mengisi sekitar 25% komoditas gandum di samping komoditas-komoditas lain. Hal tersebut dapat berdampak langsung kepada masyarakat ketika industri-industri pangan terdampak dan harus menaikkan harga produk mereka seperti mie Instan, roti, dan produk-produk turunan lain dari gandum.
2. Pemerintah harus berperan aktif menggunakan kekuatan diplomatik dan kedekatannya dengan Rusia untuk dapat menekan agar Rusia dapat menghentikan serangan dan mengakhiri konflik yang terjadi antara Rusia - Ukraina sesegera mungkin melalui perundingan dua negara. Untuk menanggulangi naiknya harga pangan dalam negeri pemerintah harus segera mencari pengganti pemasok gandum dan komoditas lain yang ketersediaan dalam negerinya terdampak konflik Rusia - Ukraina.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu PBB agar menggelar Sidang Umum dalam Majelis Umum PBB, dan melakukan voting untuk membuat Resolusi PBB dalam penyelesaian konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia termasuk Rusia dan Ukraina maupun negara-negara pendukung yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kapasitas untuk menghentikan perang yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- BBC News (2019). Ukraine Country Profile. Diakses dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-18018002>, Pada 14 Agustus 2022.
- CNN Indonesia (2022). Ukraina Sebut 1.000 Anggota Militer Tewas Akibat Serangan Rusia. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220226081256-134-764358/ukraina-sebut-1000-anggota-militer-tewas-akibat-serangan-rusia>, Pada 14 Agustus 2022.
- DP, Yustinus Andri. (2022). Rusia-Ukraina dan Tingginya Ketergantungan Impor Gandum Indonesia. Diakses dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220225/9/1504676/rusia-ukraina-dan-tingginya-ketergantungan-impor-gandum-indonesia>, Pada 14 Agustus 2022.
- Hardiantoro, Alinda. (2022). Analisis Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia serta Dampaknya. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/05/092400265/analisis-kunjungan-jokowi-ke-ukraina-dan-rusia-serta-dampaknya?page=all>, Pada 14 Agustus 2022.
- Iswara, Aditya Jaya. (2022). Apa Itu Perjanjian Minsk dan Fungsinya dalam Konflik Rusia-Ukraina. Diakses dari: <https://amp.kompas.com/internasional/read/2022/02/14/203700970/apa-ituperjanjian-minsk-dan-fungsinya-dalam-konflik-rusia-ukraina>, Pada 14 Agustus 2022.
- Kementerian ESDM. (2022). Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral. Diakses dari: <https://dataharian.esdm.go.id/index.php/2022/03/10/reviu-informasi-strategis-energi-danmineral-harian-10-maret-2022/?msclid=41ec4ec9d03511ec8878719eba107c21>, Pada 14 Agustus 2022.
- Kurmala, Aziz. (2022). Ini Sikap Indonesia Terhadap Konflik Rusia-Ukraina. Diakses dari News: <https://www.antaraneews.com/berita/2723745/ini-sikap-indonesia-terhadap-konflik-rusia-ukraina#mobile-nav>, Pada 14 Agustus 2022.
- Kusnandar, Viva Budy. (2022). Gandum Indonesia Juga Diimpor dari Ukraina, Harga Mie Instan Dikhawatirkan Naik. Diakses dari Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/25/gandum-indonesia-juga-diimpor-dari-ukraina-harga-mie-istan-dikhawatirkan-naik>, Pada 14 Agustus 2022.
- Kusnandar, Viva Budy. (2022). Ini Daftar Barang Yang Diimpor Indonesia dari Ukraina. Diakses dari Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/24/ini-daftar-barang-yang-diimpor-indonesia-dari-ukraina>, Pada 14 Agustus 2022.
- Permana, Sony Hendra. (2022). Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Indonesia. Pusat Penelitian DPR RI, Vol. XIV, No. 5
- Raditya, Iswara N. (2022). Sejarah Ukraina Merdeka dari Soviet Hingga Perang vs Rusia Terkini. Diakses dari Tirto: <https://tirto.id/gpo7>, Pada 14 Agustus 2022.
- Rakhmayanti, Intan. (2022). Rusia-Ukraina yang Perang, Harga Pangan Dunia Beterbangan. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220223205024-4-317797/rusiaukraina-yang-perang-harga-pangan-dunia>, Pada 14 Agustus 2022.
- Siswanto, Dendi. (2022). Efek Perang Rusia dan Ukraina, Waspada Kenaikan Harga Pangan. Diakses dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/efek-perang-rusia-dan-ukraina-waspada-kenaikan-harga-pangan>, Pada 14 Agustus 2022.
- SMERU Research Institute, PROSPERA, UNDP, dan UNICEF (2020). Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia. Diakses dari: <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan->

[eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi](#),  
Pada 14 Agustus 2022.

Sridianti. (2022). Konferensi PBB Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Diakses dari:  
<https://sridianti.com/konferensi-pbb-tentang-perdagangan-dan-pembangunanunctad.html?msclkid=a16b95bad03511ec97570e095f4f7398>, Pada 14 Agustus 2022.

Subtelny, Orest. (2000). Ukraine: A History. Toronto: University of Toronto Press

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit CV Alfabeta.

Sunyoto, Mulyo. (2022). Peran Indonesia Dalam Konflik Rusia-Ukraina. Diakses dari:  
<https://www.antaraneews.com/berita/2756353/peran-indonesia-dalam-konflik-rusia-ukraina#mobile-src>, Pada 14 Agustus 2022..

Tristanto. (2022). Mengundang Rusia dan Ukraina ke Pertemuan G20. Diakses dari:  
<https://news.detik.com/kolom/d-6041892/mengundang-rusia-dan-ukraina-ke-pertemuan-g20>, Pada 14 Agustus 2022.

V. Riasanovsky, Nicholas. (1963). A History of Russia. New York: Oxford University Press

Yuliasuti, Nusarina. (2022). Ketegangan Rusia dan Ukraina. Diakses dari:  
<https://www.antaraneews.com/berita/2706617/pasar-energi-asia-awasi-dampak-keteganganrusia-ukraina?msclkid=a2e6a163d03611ec8c420d265e0dab40>, Pada 14 Agustus 2022.